Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan Vol. 2 No. 2 tahun 2025.
Surati, Saefudin Zuhri : 140 - 149
© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v2i2.

ANALISIS AKUNTABILITAS INFORMASI PUBLIK PADA PORTAL INFORMASI DAN DOKUMENTASI MILIK TENTARA NASIONAL INDONESIA

Surati[1], Saefudin Zuhri[2]

[12]Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Krisnadwipayana
Email: mas.zuhry88@gmail.com
Submitted: 5 June 2025 ; Revised: 12 November 2025 ; Accepted: 30 December 2025

Abstract

This research aims to analyze Public Information Accountability Study on the Information and Documentation Management Officer Portal of the Indonesian National Army and identify factors that influence the accountability of public information on the information and documentation management official portal of the Indonesian National Army. This research uses a qualitative approach with interview techniques, observation and focus group discussions to gain deeper understanding. The findings of this research indicate that the TNI PPID Website encourages open information towards a transparent process in the TNI military world. In principle, transparency is part of the government's efforts to foster public trust in the government while involving the public in carrying out the controlling function of all efforts or endeavors carried out by the government in order to improve the welfare of the community. The e-government model framework was also initiated by the United Nations (UN) in 2012. This model was developed based on the ranking of UN member countries. The stages are defined as Emerging Presence, Enhanced Presence, Transactional Presence, and Connection Service.

Keywords: Accountability, Public Information, PPID TNI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas Informasi Publik: Studi Pada Portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tentara Nasional Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas informasi publik pada portal pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tentara nasional indonesia Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terarah untuk menggali pemahaman yang lebih dalam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Website PPID TNI mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam dunia militer TNI. Pada prinsipnya transparansi adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus melibatkan masyarakat dalam menjalankan fungsi controlling terhadap segala upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerangka model *e-government* juga digagas oleh United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2012. Model ini dikembangkan berdasarkan rangking negara-negara anggota PBB. Tahapan *didefinisikan Emerging Presence, Enhanced Presence, Transactional Presence,* dan *Connection Service*.

Kata kunci: Akuntabilitas, Informasi Publik, PPID TNI

PENDAHULUAN

Kehadiran PPID merupakan bentuk realisasi dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v2i2.

publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik terjadi karena adanya perubahan sosial akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mempengaruhi aspek perilaku masyarakat. Instruksi ini menekankan pemerintah dalam memaksimalkan pengaplikasian teknologi informasi melalui *electonic governance* (e-*governance*) untuk mendorong terwujudnya *good governance* (Indrajit, 2006).

Istilah *E-government* atau dikenal dengan pemerintahan berbasis elektronik menjadi hal yang lumrah diketahui berdampingan dengan peningkatan dinamika Teknologi Informasi dan Komunikasi. Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* merupakan batu lonjakan yang baru bagi pemerintahan untuk menggunkan teknologi, komunikasi dan Informasi yang diharapkan mampu mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan saat ini seperti efisiensi, efektivitas, transparansi serta akuntabalitas (Andrianto, 2007). *E-government* sebagai contoh penerapan dalam kebermanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam ruang lungkup pemerintahan perlu dipersiapkan dalam menunjang kesempatan dan rintangan dengan membuat pengadaan perangkat sistem jaringan teknologi nan informasi sehingga mampu dimaksimalkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Pada tahun 2008, pemerintah merespon perkembangan teknologi ini dalam pemerintahan terutama kemudahan akses informasi bagi masyarakat melalui Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mabes TNI sebagai salah satu instansi pertahanan yang ada di Indonesia yang juga ikut ambil bagian dalam rangka menunaikan kewajiban untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mabes TNI menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut dengan menerbitkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/611/VII/2011 Tentang Pengangkatan Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan TNI. PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Selain keputusan tersebut,

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v2i2.

Panglima TNI juga menerbitkan standar pelayanan informasi publik dengan menerbitkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Tni Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Bentuk implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah dengan dibentuknya portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mabes TNI yaitu www.ppid.tni.mil.id. Portal ini memiliki beberapa aspek seperti struktur dan visi misi Mabes TNI, aspek informasi publik, aspek standar pelayanan dan aspek pelayanan jika ada pengunjung portal yang memohon informasi. Selain itu, portal ini juga terintegrasi dengan website lainnya yang terkait dengan Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan pada sifat dari instansi militer yang tidak seperti instansi pemerintah lainnya, informasi publik yang ditunjukkan di PPID Mabes TNI tentu akan tidak sama dengan PPID di instansi pemerintah lainnya baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Selain itu, Mabes TNI bukan instansi yang memang fokus dalam memberikan pelayanan pubik. Ini menjadi fakta empiris atas signifikansi dari penelitian ini. Tantangannya adalah ada pada seberapa jauh konsep e-government dapat menejelaskan tentang PPID Mabes TNI. Oleh sebab itu, penelitian ini meneliti bagaimana e-government diterapkan di Mabes TNI.

KAJIAN PUSTAKA

Model dan Tahapan *E-Government*

E- Government adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. *E-Government* merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemnfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien (Suaedi, 2020).

E-Government merupakan suatu istilah yang masih baru bagi masyarakat di kebanyakan negara

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v2i2.

berkembang. Seringkali bahkan, istilah itu disalahartikan. Secara konseptual, *e-Government* sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Pemerintah di banyak negara, baik negara maju maupun negara sedang berkembang, telah sejak lama menggunakan sistem komputer untuk membantu dan mendukung pekerjaan administrasi dan pengolahan data yang kesemuanya bermuara pada pelayanan masyarakat (*public service*). Perbedaan yang mencolok antara konsep *e-Government* yang dikenal sekarang dengan penerapannya pada masa lalu terletak pada cakupan penggunaan sistem komputer/informasi dalam melayani baik masyarakat maupun stake holders lainnya seperti karyawan/pegawai, departemen/lembaga pemerintah lainnya, organisasi swasta, dan sebagainya (Indrajit, 2016).

Pentingnya *e-government* salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Ada dua model *e-government* yang dipakai dalam penelitian ini. Pertama, Model Kematangan Lima Tahap Hiller dan ASPA (Hiller'sAnd ASPA's Five-Stage Model, 2000). Argumentasi dari tujuan dari implementasi *e-government* adalah untuk menyediakan pelayanan publik berbasis web. Hiller (2001) telah mengusulkan suatu model *e-government* yang terdiri dari lima tahap berikut: 1). Menghadirkan *website* instansi (*Emerging Web Presence*). Ini merupakan tingkat Persiapan berupa pembuatan situs web sebagai media informasi dankomunikasi pada setiap lembaga serta sosialisasi situs web untuk internal dan publik; 2). Meningkatkan fitur dari website yang dikembangkan (*Enhanced Web Presence*); 3). Kehadiran website sudah pada tahap interaktif (*Interactive Web Presence*). Tingkat ini merupakan tingkat pematangan yang berupa pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain; 4). Kehadiran website sudah pada tahap dilengkapi denganfitur transaksi (*Transactional Web Presence*). Pada tingkat pemantapan ini berisi pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain; dan Kehadiran website sudah terintegrasi (*Fully Integrated Web Presence*) (Hiller, 2001). Pada tahap ini tingkat pemanfaatan yang berisi Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat *Government to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B), *Government to Consumers* (G2C) yang sudah saling terintegrasi.

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v2i2.

Kerangka model *e-government* juga digagas oleh United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2012. Model ini dikembangkan berdasarkan rangking negara-negara anggota PBB. Tahapan didefinisikan sebagai berikut: 1). *Emerging Presence*. Pada tahap pertama ini website e-government menyediakan informasi yang statis; 2). *Enhanced Presence*. Pada tahap kedua ini kehadiranwebsite ditingkatkan menjadi dua arah walah masihmasuk kategori yang sederhana; 3). *Transactional Presence*; pada tahap ini telah tersediafitur komunikasi dua arah yang interaktif denganmasyarakat; 4). *Connection Service*. Pada tahap ini, website lebih proaktif dalam memenuhi permintaan dan umpanbalik dari masyarakat via perangkat web 2.0. Lembaga pemerintah berfokus pada kebutuhan masyarakat danpelayanan fokus pada kebutuhan pelanggan.

Untuk menganalisis Portal PPID milik TNI, kerangka teoritiknya mengacu pada model *e-government* yang digagas oleh United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2012. Model ini dikembangkan berdasarkan rangking negara-negara anggota PBB. Tahapan didefinisikan sebagai berikut. *Pertama*, *Emerging Presence*. Pada tahap pertama ini website *e-government* menyediakan informasi yang statis. *Kedua*, *Enhanced Presence*. Pada tahap kedua ini kehadiran website ditingkatkan menjadi dua arah. *Ketiga*, *Transactional Presence.* Pada tahap ini telah tersediafitur komunikasi dua arah yang interaktif dengan masyarakat. *Keempat*, *Connection Service*. Pada tahap ini, website lebih proaktif dalam memenuhi permintaan dan umpanbalik dari masyarakat via perangkat web 2.0. Lembaga pemerintah berfokus pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan fokus pada kebutuhan pelanggan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Berdasarkan tujuan penelitiannya, jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian yang bersifat deskriptif itu sendiri yaitu untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu (Arikunto, 2014). Pemilihan informan dilakukan melalui *purposive* atau sengaja dimana informan

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v2i2.

telah ditetapkan sebelumnya (Moleong, 2000). Data dan informasi diambil dengan teknik triangulasi yakni wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2009). Adapaun proses analisis data dilakukan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Basrowi & Suwanda, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas pokok dan fungsi dari PPID telah ditetapkan pada keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: Kep/460/VII/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan markas besar Tentara Nasional Indonesia. *Pertama*, menjamin adanya keterbukaan informasi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan dapat diakses oleh publik. *Kedua*, Menyediakan, menyimpan dan mendokumentasikan informasi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. *Ketiga*, Melayani informasi publik dengan akurat dan benar, serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. *Keempat*, Melayani informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana serta bersifat proaktif. *Kelima*, Membangun dan mngembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. *Keenam*, Mengoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan PPID pelaksana di Satker untuk memenuhi permohonan informasi. *Ketujuh*, Mengetapkan informasi yang dikecualikan dan menentukan jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses. *Kedelapan*, Membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis maka dapat diurakan Kerangka model e-government juga digagas oleh United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2012. *Pertama*, tahapan *Emerging Web Presence*. Pada website PPID maka dapat disimpulkan bahwa website PPID menyajikan beberapa informasi yang berkaitan dengan beberapa divisi yang berada di MABES TNI, Divisi terkait telah mengelola website PPID tersebut, dan melakukan apa yang menjadi definisi tahapan Emerging Web Presence yaitu

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v2i2.

informasi dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. website PPID memuat beberapa informasi yang dibutuhkan publik, jadi website PPID ini sudah masuk pada tahapan kategori Emerging Web Presence.

Kedua, *Enchanced Web Presence*. Pada website PPID terdapat poin standar pelayanan yang berisi alur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, selain itu terdapat informasi Alamat Kantor Mabes Cilangkap, fax, email, nomor telepon dan *contact center*, pada website terdapat dibagian bawah sudah tertera informasi tersebut. Pada website PPID telah tersedia informasi untuk berkomunikasi kemudian terdapat form yang dapat diunduh oleh publik. website PPID sudah melalui tahapan tersebut, website PPID memuat informasi komunikasi untuk menghubungkan masyarakat publik kepada pengelola PPID untuk mendapatkan informasi publik melalui *call center* maupun tanya jawab online.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa tahapan pada saat ini Portal PPID TNI berada pada tahap ini yakni tahap website menyediakan wadah untuk berkomunikasi. website PPID sudah melalui tahapan tersebut, website PPID memuat fasilitas untuk menghubungkan masyarakat publik kepada pengelola PPID untuk mendapatkan informasi publik. Namun untuk tahap *Transactional presence*, website PPID belum berada pada tahapan ini. hal ini dikarenakan website ini tidak membuka transaksi pembayaran.

Kemudian tahapan *connection service* pada website PPID antara lain pada tahap ini merupakan tahapan website PPID memberikan tanggapan maupun umpan balik atau respon terhadap laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Sejauh ini website PPID cukup aktif untuk merespon dan memberikan tanggapan. Berdasarkan hasil laporan yang diterima, sudah hampir 80% telah direspon dengan baik. Kemudian komunikasi antara website PPID dengan publik melalui *call center* atau *contact center* cukup baik direspon.

Website PPID berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Kami selalu berusaha membentu menjawab permasalahan masyarakat. Pada hal ini menunjukkan bahwa website PPID telah memasuki tahapan *connection service*. Website PPID TNI mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam dunia militer TNI. Pada prinsipnya transparansi adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v2i2.

terhadap pemerintah sekaligus melibatkan masyarakat dalam menjalankan fungsi controlling terhadap segala upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Daya tanggap Website PPID TNI diartikan sebagai kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda priority, dan mengembangkannya ke dalam program-program yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Responsivitas dapat diukur dari sejauh mana kesigapan dalam memberikan tanggapan yang cepat atas keluhan dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan akuntabilitas adalah pola komunikasi yang intens dengan data yang berimbang dan valid antara yang memberikan amanah (*trustor*) dengan pihak yang menerima amanah (trustee). Artinya jaminan akan keterbukaan informasi yang menghubungkan antara keduanya menjadi kunci dalam menciptakan pola akuntabilitas yang baik. melalui Portal PPID, Mabes TNI sebagai *trustee* hendak memberikan data yang valid berkaitan dengan kinerja dan perkembangan atas hasil pencapaian tujuan yang telah dilakukan. Hal ini akan menjadi rujukan bagi *trustor* dalam hal ini masyarakat untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja yang dilakukan. Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang penting karena dalam pemerintahan yang tertutup rawan akan terjadinya kecurigaan dan penyalahgunaan. Informasi publik yang seharusnya di publikasikan kepada masyarakat luas hanya dikuasai oleh penjabatpemerintahan yang mendorong terjadinya penyalahgunaan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Maka dari itu dalam Keterbukaan informasi publik terdapat beberapa prinsip yang dapat mewujudkan good governance yaitu prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Tahap-tahap pengembangan *e-government* ini digunakan oleh DPEPA dalam mengkategorikan negara-negara anggota PBB. Dimana Indonesia masuk kedalam kategori negaranegara yang berada pada tahap *Enhanced*. Namun pada website PPID Tentara Nasional Indonesia telah melalui tahap E-Government pada tingkat terakhir yaitu *connection Service*. Pada tahap ini, website lebih proaktif dalam memenuhi permintaan dan umpanbalik dari masyarakat

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v2i2.

via perangkat web 2.0. Lembaga pemerintah berfokus pada kebutuhan masyarakat danpelayanan fokus pada kebutuhan pelanggan. Namun pada website PPID Tentara Nasional Indonesia tidak melalui tahapan *Transactional* hal ini dikarenakan website ini berfokus kepada informasi kegiatan Tentara Nasional Indonesia bukan menyajikan layanan pembayaran ataupun transaksi bisnis.

KESIMPULAN

Website PPID TNI mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam dunia militer TNI. Pada prinsipnya transparansi adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus melibatkan masyarakat dalam menjalankan fungsi controlling terhadap segala upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahapan Emerging Web Presence pada website PPID maka dapat disimpulkan bahwa website PPID menyajikan beberapa informasi yang berkaitan dengan beberapa divisi yang berada di MABES TNI, Divisi terkait telah mengelola website PPID tersebut. Enchanced Web Presence pada website PPID terdapat poin standar pelayanan yang berisi alur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, selain itu terdapat informasi Alamat Kantor Mabes Cilangkap, fax, email, nomor telephone dan contact center, pada website terdapat dibagian bawah sudah tertera informasi tersebut. Transactional presence pada website PPID adalah website PPID belum berada pada tahapan ini, hal ini dikarenakan website ini berfokus kepada informasi kegiatan Tentara Nasional Indonesia bukan menyajikan layanan pembayaran ataupun transaksi bisnis. Tahapan connection service pada website PPID antara lain pada tahap ini merupakan tahapan website PPID memberikan tanggapan maupun umpan balik atau respon terhadap laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Albaar, M. R. 2020. *Implementasi E-government dalam Menciptakan Pemerintahan Baik dan Bersih.* Cirebon: CV. Syntax Computama.

Andrianto, N. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government.* Malang: Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI Jatim

© Presidensi: Jurnal Politik dan Pemerintahan 2025 **E-ISSN: 3089-3453**
DOI : https://doi.org/10.64019/presidensi.v2i2.

Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 209.

Indrajit, R. E. 2016. *Konsep dan Strategi Electronic Government*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Kumorotomo, W., & Agus Margono, S. 2004. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suaedi, Falih Dan Wardiyanto. 2020. *Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi Dan E-Governance*). Yogyakarta: Graha Ilmu

Sari, Wahyu Agus dan Kusuma Dewi Arum Winarno. 2012. "Implementasi E-Goverment System Dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Goverment Di Indonesia," *Jurnal Jeam 9* (1) pp 21-30

Wulandari, I. A., Satori, M., & Nurrahman, A. A. 2022. "Perancangan Sistem Informasi Bank Sampah Kota Bandung Berbasis Website". Bandung *Conference Series: Industrial Engineering Science*, 2(1)

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.